



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAHMADINOL
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 505959

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2420 m2/105 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 198.000.000

1. MOBIL, MITSHUBISHI PICK UP Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO FIT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 97.000.000
4. MOTOR, HONDA CBR 125 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOTOR, HONDA F1C02N28L0 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
6. MOTOR, YAMAHA B6H-AI A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.689.528

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 529.689.528

III. HUTANG Rp. 309.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 220.689.528



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.